

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Brigham dan Houston (2010), menyatakan bahwa hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer, sehingga muncullah konflik kepentingan antara pemilik atau prinsipal (*investor*) dengan manajer (*agent*).

Menurut Purwandari dan Purwanto (2012), dalam kerangka teori keagenan, terdapat tiga macam hubungan keagenan, yaitu: 1) hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik, 2) hubungan keagenan antara manajer dengan kreditur dan 3) hubungan keagenan antara manajer dengan pemerintah. Hal ini berarti ada kecenderungan bagi manajer untuk melaporkan sesuatu dengan cara-cara tertentu dalam rangka memaksimalkan utilitas mereka dalam hal hubungannya dengan pemilik, kreditur maupun pemerintah. Kelengkapan pengungkapan informasi harus se-transparan mungkin sebagaimana yang dikehendaki dalam kontrak keagenan. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Akibat dari munculnya mekanisme pengawasan tersebut menyebabkan timbulnya suatu *cost* yang disebut dengan *agency cost*, yang meliputi *monitoring costs*, *bonding costs*, dan *residual losses*.

Monitoring cost yaitu biaya yang timbul dan ditanggung prinsipal untuk mengawasi perilaku agen. *Bonding cost* adalah biaya yang ditanggung oleh agen menempatkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. *Residual loss* adalah nilai kerugian yang dialami prinsipal akibat keputusan yang diambil oleh agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal.

Hubungannya teori keagenan dengan nilai perusahaan yaitu karena dalam hubungan keagenan muncul konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Maka kualitas audit sangat dibutuhkan dalam menjaga kekayaan perusahaan sehingga nilai perusahaan juga akan menjadi baik.

2.2 Nilai Perusahaan

2.2.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Menurut Husnan (2012) dan Pudjiastuti, nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.

Pada dasarnya tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Jika perusahaan berjalan lancar maka nilai saham perusahaan akan semakin meningkat, namun nilai hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak berpengaruh. Nilai perusahaan dapat dilihat melalui nilai pasar atau nilai buku perusahaan dari ekuitasnya. Ia menambahkan dalam neraca keuangan, ekuitas

menggambarkan total modal perusahaan. Selain itu, nilai pasar dapat menjadi ukuran nilai perusahaan. Penilaian nilai perusahaan tidak hanya mengacu pada nilai nominal. Menurutnya kondisi perusahaan mengalami banyak perubahan setiap waktu secara signifikan. Sebelum krisis nilai perusahaan dan nominalnya cukup tinggi. Tetapi setelah krisis kondisi perusahaan merosot sementara nilai nominalnya tetap. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari nilai sahamnya. Jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan bahwa nilai perusahaannya juga baik. Karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham.

2.2.2 Pengukuran Nilai Perusahaan

Moniaga (2013) terdapat beberapa pendekatan analisis rasio dalam penilaian *market value*, terdiri dari pendekatan *price earning ratio* (PER), *price book value ratio* (PBVR), *market book ratio* (MBR), *dividen yield ratio* (DYR), dan *dividen payout ratio* (DPR). Dalam penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan PBV. *Price Book Value* digunakan sebagai proksi karena keberadaan PBV sangat penting bagi investor untuk menentukan strategi investasi di pasar modal. PBV dapat menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan.

PBV merupakan rasio antara harga saham terhadap nilai bukunya. Semakin tinggi PBV, semakin tinggi tingkat kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan, maka akan menjadi daya tarik bagi investor untuk membelinya, sehingga permintaan jumlah modal yang diinvestasikan. PBV merupakan rasio antara harga saham terhadap nilai bukunya. Semakin tinggi PBV, semakin tinggi tingkat kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan, maka akan menjadi daya tarik bagi investor untuk membelinya, sehingga permintaan saham tersebut akan naik dan meningkatkan harga saham. Semakin tinggi harga saham, semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Ada beberapa keunggulan PBV yaitu nilai buku merupakan ukuran yang stabil dan sederhana yang dapat

dibandingkan dengan harga pasar. Keunggulan kedua adalah PBV dapat dibandingkan antar perusahaan sejenis untuk menunjukkan tanda mahal atau murah nya suatu saham perusahaan.

2.2.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan

Kharisma (2013) menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan, diantaranya:

1) Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai perusahaan. Dalam hal besarnya perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran para pemilik atas aset tersebut. Dari sisi pemilik perusahaan, jumlah aset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi manajemen kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan.

2) *Leverage*

Leverage akan menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. *Leverage* juga merupakan penaksir dari risiko yang melekat pada suatu perusahaan. Artinya, *leverage* yang besar menunjukkan risiko investasi yang besar pula, begitupun sebaliknya. Akan lebih baik apabila perusahaan mengusahakan sumber pendanaan internal terlebih dahulu daripada menggunakan sumber pendanaan eksternal. Dengan demikian, dapat disimpulkan rasio *leverage* yang tinggi menyebabkan turunnya nilai perusahaan.

3) Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat berbagai macam seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau aset, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Rasio ini menunjukkan keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan. Naiknya laba bersih dapat mengindikasikan bahwa nilai perusahaan juga naik karena dengan naiknya laba bersih akan menyebabkan harga saham yang berarti juga kenaikan dalam nilai perusahaan. macam seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau aset, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Rasio ini menunjukkan keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan. Naiknya laba bersih dapat mengindikasikan bahwa nilai perusahaan juga naik karena dengan naiknya laba bersih akan menyebabkan harga saham yang berarti juga kenaikan dalam nilai perusahaan.

4) Kebijakan Dividen

Kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen kepada para pemegang saham merupakan suatu kebijakan penting. Kebijakan dalam pembagian dividen (*dividend policy*) tidak hanya sekedar membagikan keuntungan yang telah diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham, namun juga merupakan suatu kebijakan yang harus diikuti dengan pertimbangan adanya kesempatan. Haruman (2011: 6) menjelaskan kebijakan dividen merupakan *corporate action* yang penting yang harus dilakukan perusahaan. Kebijakan tersebut dapat menentukan berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham. Semakin besar dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, maka kinerja perusahaan akan dianggap semakin baik. Pada akhirnya perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dianggap menguntungkan dan tentunya penilaian terhadap perusahaan tersebut akan semakin baik, yang biasanya tercermin melalui tingkat harga saham perusahaan.

2.2.4 Indikator Nilai Perusahaan

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur nilai perusahaan adalah *price to book value* (PBV). PBV adalah angka rasio yang menjelaskan seberapa kali seorang investor bersedia membayar sebuah saham untuk setiap nilai buku per sahamnya. PBV diperoleh dengan cara membagi harga pasar saham dengan Nilai Buku Per Saham atau *Book Value Per Share* (BVPS). Nilai Buku Per Saham (BVPS) diperoleh dengan cara membagi total ekuitas perusahaan pada periode tertentu dengan jumlah sahamnya yang tercatat di Bursa Efek (Menurut Husnan 2012).

2.3 Board Size

2.3.1 Pengertian Board Size

Board size merupakan organ perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit. Berikut adalah penjelasannya:

1. Dewan Komisaris

Menurut Sutedi (2011), Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Fungsi Dewan Komisaris, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan.
- c. Membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
- d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.
- e. Memantau dan memastikan implementasi GCG dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
- f. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat

gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan.

2. Dewan Direksi

Menurut Sutedi (2011), Dewan Direksi adalah *board of directors* yaitu pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Tugas dan fungsi utama Dewan Direksi menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola dan di-*manage* oleh Direksi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan tugas pokok Dewan Direksi adalah:

- a. Bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perusahaan.
- b. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud, tujuan perusahaan dan demi kepentingan perusahaan.
- c. Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.

3. Komite Audit

Secara kualitatif, hal yang paling penting bagi anggota komite audit dalam melaksanakan fungsi komite adalah sifat independensinya. Independensi merupakan elemen kritis yang akan menentukan terlaksananya keseluruhan peran komite audit secara objektif serta pencapaian manajemen yang akuntabel bagi para pemegang saham (Baridwan,2000). Beberapa penelitian sebelumnya, menemukan bahwa dengan tingkat independensi yang tinggi akan memberikan dua manfaat yang penting, yaitu tingkat pengawasan yang tinggi dan rendahnya tingkat kecurangan laporan keuangan.

Menurut Sutedi (2011), Komite audit adalah sekelompok komite yang dipercayai untuk melakukan audit internal dalam perusahaan. Komite Audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Ketua komite audit bertanggungjawab penuh kepada Dewan Komisaris dalam

bentuk laporan berkala. Komite audit membantu dewan komisaris untuk memastikan:

- a. Laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar dan transparan.
- b. Dalam melaksanakan audit (eksternal maupun internal) telah dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku.
- c. Pengendalian perusahaan telah dilaksanakan dengan maksimal.
- d. Memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- e. Menindaklanjuti temuan audit yang dilakukan oleh manajemen.

2.3.2 Indikator *Board Size*

Dalam penelitian ini *board size* akan diukur dengan indikator yang diadopsi dari penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewata, dkk (2015) dengan menambah komite audit karena komite audit merupakan organ perusahaan (Sutedi, 2011). Berikut adalah penjelasannya:

1. Dalam penelitian ini Dewan Direksi (DD) akan diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan.
2. Dalam penelitian ini Dewan Komisaris (DK) akan diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan.
3. Dalam penelitian ini Komite Audit (KA) diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan.

2.4 Kualitas Audit

2.4.1 Pengertian Kualitas Audit

Ikatan Akuntan Indonesia (2011), menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kualitas Audit adalah:

1. Meningkatkan pendidikan profesionalnya.
2. Mempertahankan Independensi dalam sikap mental.

3. Dalam melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik.
5. Memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten.
7. Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah hasil audit yang memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

2.4.2 Indikator Kualitas Audit

Dalam penelitian ini kualitas audit akan diukur dengan indikator yang diadopsi dari penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewata, dkk (2015). Kualitas audit diukur dengan kompetensi audit yang diproksikan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kantor akuntan publik *big-4* secara umum dianggap sebagai penyedia laporan audit yang berkualitas tinggi, klien. KAP *big-4* adalah empat perusahaan akuntansi internasional terbesar dan perusahaan jasa profesional yang bergerak dalam bidang audit, dan konsultasi untuk perusahaan perdagangan dan swasta. Adapun yang termasuk dalam *big-4* adalah:

1. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
2. KAP Osman Bing Satrio & Eny.
3. KAP Sidharta dan Widjaja.
4. KAP Purwantono, Suherman & Surja.

2.5 Struktur Modal

2.5.1 Pengertian Struktur Modal

Menurut Riyanto (2012), struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri, sedangkan menurut Sudana (2011), struktur modal berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang

suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Menurut Brigham dan Houston (2010), terdapat empat faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal, antara lain:

1. Risiko Bisnis

Tingkat risiko yang terdapat dalam operasi perusahaan apabila tidak menggunakan utang. Semakin besar risiko bisnis perusahaan, semakin rendah rasio utang yang optimal.

2. Posisi Pajak Perusahaan

Alasan utama menggunakan utang adalah karena biaya bunga dapat dikurangkan dalam penghitungan pajak, sehingga menurunkan biaya utang yang sesungguhnya.

3. Fleksibilitas Keuangan

Kemampuan untuk menambah modal dengan persyaratan yang wajar dalam keadaan yang memburuk. Para manajer dana perusahaan mengetahui bahwa penyedia modal yang mantap diperlukan untuk operasi yang stabil, dan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan jangka panjang.

4. Konservatisme atau Agresivitas Manajemen

Sebagian manajemen lebih agresif dari yang lain, sehingga sebagian perusahaan lebih cenderung menggunakan utang untuk meningkatkan laba. Faktor ini tidak mempengaruhi struktur modal yang optimal atau yang memaksimalkan nilai, tetapi akan mempengaruhi struktur modal yang ditargetkan atau yang telah ditetapkan manajer

2.5.2 Indikator Struktur Modal

Mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Riyanto (2012) dan Sudana (2011), yang menyatakan bahwa struktur modal merupakan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri maka struktur modal dalam penelitian ini akan diukur dengan *Longterm Debt to Equity Ratio* (LDER). Menurut Kasmir (2013), *Longterm Debt to Equity Ratio* (LDER) merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

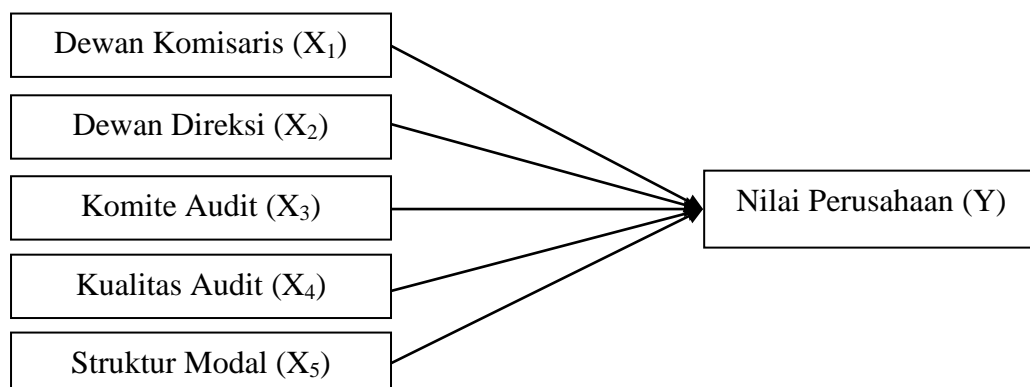
No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Kusnaeni (2012)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia	Variabel Bebas: Struktur Modal Variabel Terikat: Nilai Perusahaan	Struktur Modal Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan
2	Dewi, dkk (2014)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012)	Variabel Bebas: Struktur Modal Variabel Terikat: Nilai Perusahaan	Struktur Modal Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan
3	Sari dan Ardiana (2014)	Pengaruh <i>Board Size</i> Terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Bebas: <i>Board Size</i> Variabel Terikat: Nilai Perusahaan	<i>Board Size</i> Tidak Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan, Secara Parsial Dewan Komisaris

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
				<p>Independen dan Dewan Komisaris Non Independen serta Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan Komite Audit Tidak Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan</p>
4	Dewata, dkk (2015)	Pengaruh <i>Board Size</i> dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan Tambang Batubara Yang Terdaftar di BEI	<p>Variabel Bebas: <i>Board Size</i> dan Kualitas Audit</p> <p>Variabel Terikat: Nilai Perusahaan</p>	<p><i>Bard Size</i> Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan Kualitas Audit Tidak Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
5	Anggi Agytia (2015)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai Variabel Moderating	Variabel Bebas : Kinerja Keuangan, Pengungkapan CSR Mempengaruhi Hubungan Kinerja Keuangan, GCG Mempengaruhi Hubungan Kinerja Keuangan. Variabel Terikat : Nilai Perusahaan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa GCG yang diproksi oleh Kepemilikan Manajerial tidak mempengaruhi atau tidak berfungsi sebagai pemoderasi hubungan variabel Kinerja Keuangan yang diproksi Oleh Return On Assets terhadap Nilai Perusahaan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan kerangka pemikiran dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi terkait dengan tujuan dilakukannya penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 diketahui bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris (X_1), dewan direksi (X_2), komite audit (X_3), kualitas audit (X_4), struktur modal (X_5), sedangkan variabel terikatnya adalah nilai perusahaan. Tujuannya dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *board size*, kualitas audit dan struktur modal terhadap nilai perusahaan baik secara parsial dan simultan.

2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Arifani, 2012). Peran komisaris independen diharapkan akan meminimalkan permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Komisaris independen bertindak secara netral dan mendorong terlaksananya prinsip – prinsip *good corporate governance* sehingga akan mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyajikan laporan keuangan.

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Suyanti *et al.*, 2010). Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka diharapkan pemberdayaan dewan komisaris ini dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara lebih efektif dan lebih efisien sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selain itu keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran

dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* yang di harapkan perusahaan.

Septiputri dan Mutmainah (2013) juga menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin tinggi independensi yang ada dalam dewan komisaris, sehingga pengawasan yang dilakukan akan lebih obyektif terhadap pengelolaan manajemen yang berkaitan dengan profitabilitas. Apabila profitabilitas meningkat maka nilai perusahaan juga akan ikut meningkat. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen sangat diperlukan pada jajaran dewan komisaris suatu perusahaan.

Komisaris independen harus berjumlah proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan memiliki jumlah minimal sebesar 30 % dari jumlah anggota komisaris. Sebagai komisaris independen, mereka memiliki fungsi dan kedudukan mewakili kepentingan pemegang saham independen. Komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik – praktik transparansi, disklosure, kemandirian, akuntabilitas dan praktik keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian negara.

Dewan komisaris independen bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan dengan baik. Dengan demikian ketika perusahaan dijalankan dengan baik, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut akan mempunyai kinerja yang baik yang tercermin pada tingkat profitabilitas yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut sehingga kemakmuran para pemegang saham akan tercapai. Dewan komisaris yang didalamnya terdapat komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam mengawasi laporan yang *reliable* sehingga diharapkan

laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak manajemen dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian dengan hasil serupa dilakukan oleh Rupilu (2011), penelitiannya membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena rata-rata komposisi dewan komisaris independen saat ini kurang efisien dalam menjalankan fungsi pengawasan, hal ini disebabkan ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30% mungkin belum cukup tinggi untuk menyebabkan para komisaris independen tersebut dapat mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris. Sedangkan Perdana dan Raharja (2014) berhasil membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota komisaris independen maka proses pengawasan pelaporan keuangan yang dilakukan dewan komisaris akan lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan meningkatnya kinerja perusahaan karena pengawasan yang efektif dari komisaris independen maka tentu saja investor rela untuk membayar lebih mahal dan tinggi nilai saham perusahaan. Akan tetapi, penelitian Mukhtaruddin *et al.*, (2014) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan

2.8.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan

Teori Agency menyatakan bahwa *board size* yang lebih besar akan membuat pemantauan manajemen secara lebih efektif, berpotensi memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas serta memberikan saran yang lebih baik untuk kemajuan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih tinggi. *Board size* merupakan jumlah dewan direksi dan dewan komisaris dalam perusahaan. *Board size* dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan/strategi perusahaan dan memastikan, bahwa perusahaan telah sepenuhnya

menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat. Semakin besar *board size* maka semakin baik dewan direksi melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan (Dewata dkk, 2015). Dalam penelitian ini board size yang diukur dengan dewan komisaris. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan

2.8.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*) (Wijayanti dan Mutmainah, 2012). Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan oleh manajemen sesuai dengan prinsip – prinsip *good corporate governance*.

Pada umumnya komite audit beranggotakan wakil dewan komisaris, khususnya dewan komisaris independen sehingga komite audit harus bersifat independen.

Komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Sam'ani, 2008). Dengan adanya independensi dari komite audit maka diharapkan akan adanya transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan yang dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, komite audit bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas sehingga dapat meyakinkan para pemegang saham tersebut untuk mempercayakan investasinya pada perusahaan. Hal ini

membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan (Perdana dan Raharja, 2014).

Keberadaan dari komite audit hendaknya dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka penerapan *good corporate governance*, karena komite audit mampu memberikan peran yang besar dalam penerapan *good corporate governance* (Chrisdianto, 2013). Komite audit pada dasarnya mampu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai pengembangan kinerja yang berkaitan dengan upaya – upaya untuk memenuhi prinsip – prinsip *good corporate governance*. Oleh karena itu komite audit melakukan *monitoring* terhadap mekanisme *corporate governance* yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki informasi yang berbeda.

Agar penyelenggaraan *corporate governance* di Indonesia dapat berjalan dengan baik maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain dengan adanya keputusan ketua BAPEPAM – LK No: Kep – 643/BL/2012 yang menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi komite audit. Salah satu persyaratan tersebut adalah wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Persyaratan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas pelaporan keuangan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Dengan demikian komite audit memiliki kontribusi langsung dalam kualitas pelaporan keuangan.

Gill dan Obradovich (2013) dalam penelitiannya membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut mendukung hasil penelitian Perdana dan Raharja (2014) serta penelitian Mukhtaruddin *et al.*, (2014) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara

Rupilu (2011) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, kenaikan komite audit akan mendorong kenaikan nilai perusahaan sehingga keberadaan komite audit diperlukan dalam *penerapan good corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.8.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Kualitas audit sebagai salah satu informasi yang dapat memperlemah dan memperkuat pengaruh pengumuman laporan audit wajar tanpa pengecualian terhadap harga saham. Ketika auditor memberikan opini going concern atas sebuah perusahaan, maka hal ini akan berdampak terhadap keputusan investasi calon investor maupun bagi investor yang sebelumnya telah berinvestasi dalam perusahaan. Semakin tingginya tingkat independensi auditor maka akan meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan, dengan meningkatnya kredibilitas dari laporan keuangan maka diharapkan akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan, dan meningkatkan nilai perusahaan (Dewata dkk, 2015).

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.8.5 Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Riyanto (2012), struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri, sedangkan menurut Sudana (2011), struktur modal berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Jika struktur modal berada di bawah titik optimal maka setiap penambahan utang akan meningkatkan nilai perusahaan, sebaliknya, jika posisi struktur modal berada di atas titik optimal maka setiap penambahan utang akan menurunkan nilai perusahaan. Penggunaan asumsi bahwa titik target struktur modal optimal belum tercapai, maka terjadi hubungan yang positif terhadap nilai

perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi struktur modal perusahaan maka semakin tinggi juga nilai perusahaan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan